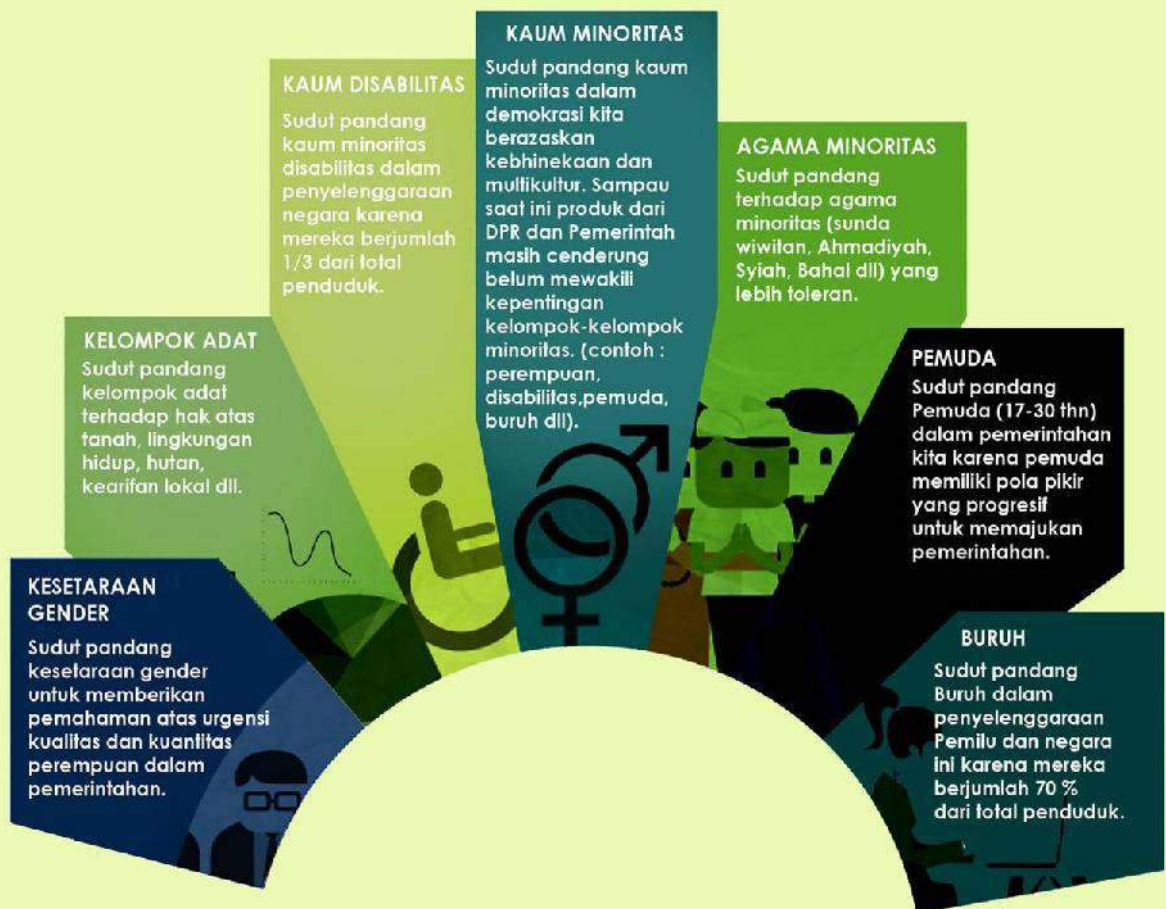


Demokrasi Kita Perlu Sudut Pandang Baru

Ada banyak perubahan yang terjadi di negeri ini sehingga turut mengubah sudut pandang kita. Demokrasi kita perlu memperhatikan hal ini jika ingin terus maju. Apa sajakah sudut pandang yang perlu ditambahkan untuk demokrasi Indonesia?



DEMOKRASI

“Pikiran itu seperti parasut,
ia hanya berfungsi ketika terbuka”

James Dewar



Pantau Pemerintahan!

Pesta Pemilu sudah usai. Nah, lalu, apa yang bisa kita lakukan setelah Pemilu ini? Bagaimana kita sebagai rakyat berkontribusi supaya negara ini bisa berjalan dengan semestinya? Inilah hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan.



Pantau UU yang sedang dibahas di DPR di **dpr.go.id**

Pantau pemerintah lewat **media massa**



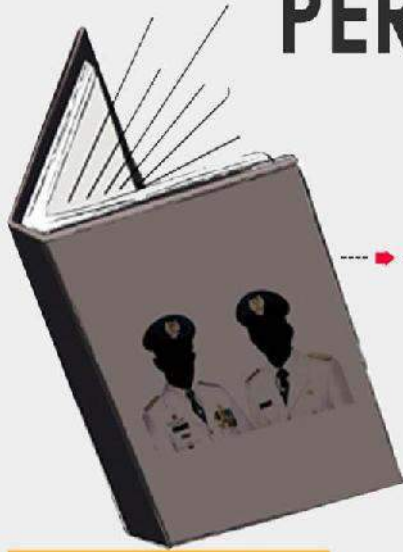
Ikuti berita, laporan, dan hasil riset dari lembaga pemantau, misalnya **ICW, TII, Mata Massa**

Pantau Janji Pemilu di **www.pemimpinkita.org** dan **kawalmenteri.org**



Sebarkan hasil pantauanmu ke medsos milikmu, **media resmi**, atau melapor ke lembaga resmi seperti **kepolisian, Ombudsman** dan lainnya

PERJALANAN BERLIKU PERPPU PILKADA



AWAL 2012

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Mengajukan Usulan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RUU Pilkada, dan RUU Pemda diusulkan berdiri sendiri.

25 SEPTEMBER 2014

DPR menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Melalui lobi politik panjang dan drama kericuhan Anggola Dewan, Paripurna akhirnya mengesahkan UU Pilkada tidak langsung.

2 OKTOBER 2014

Presiden SBY menerbitkan dua Perppu. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemda.

1 OKTOBER 2014

Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat melobi pimpinan partai di gerbang Koalisi Merah Putih. Pasalnya selama ini gerbang KMP-lah yang ngotot agar Kepala Daerah dipilih melalui DPRD alias tidak langsung. Partai Demokrat dan Koalisi Merah Putih menjalin kesepakatan hitam diatas putih untuk mendukung Pilkada langsung.

26 SEPTEMBER 2014

Presiden SBY mengaku kecewa dengan hasil keputusan DPR yang mengesahkan UU Pilkada tidak langsung. Namun dia menghormati keputusan tersebut dan menyiapkan Perppu Pilkada Langsung.

20 OKTOBER 2014



Joko Widodo dilantik menjadi Presiden menggantikan SBY

3 DESEMBER 2014



Partai Golkar Aburizal Bakrie memutuskan menolak Perppu Pilkada yang diajukan oleh SBY ke DPR.

8 DESEMBER 2014

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Mereka berdua sepakat mengusung Perppu Pilkada Langsung.

20 JANUARI 2015

Rapat Paripurna DPR mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 tentang Pemda menjadi Undang-Undang.

19 JANUARI 2014

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Perppu Pilkada langsung dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

9 DESEMBER 2014

Melalui akun Twiternya @aburizalbakrie Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie (Ical) menyatakan Partai Beringin mendukung Perppu Pilkada Langsung



@kpulomboktimur



Humas KPU Kab. Lotim



kab-lomboktimur.kpu.go.id



@HumasKpuLotim

[PEMILU]



1955

PEMILU PERTAMA



Pemilu di Indonesia dilaksanakan pertama kali pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Legislatif (DPR)

PESERTA TERBANYAK

Pemilu 1955 adalah Pemilu dengan jumlah peserta terbanyak yakni **172 Partai**.

1997-1999

QUICK COUNT

Di Indonesia metode quick count sudah dilaksanakan sejak Pemilu **1997** dan Pemilu **1999** oleh LP3ES.



2004

PILPRES LANGSUNG OLEH RAKYAT



Sejak Pemilu Tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sebelum Pemilu Tahun 2004 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Anggota DPR/MPR.

TIDAK LOLOS KARENA SAKIT

K.H. Abdurrahman Wahid dan **Marwah Daud Ibrahim** (dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa) mendaftarkan diri sebagai calon Presiden ke KPU namun **tidak lolos** karena alasan kesehatan.



2 PUTARAN



Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 dilaksanakan dua putaran karena **tidak** ada calon yang memperoleh pencapaian suara **51 %**.

ABSEN SAAT PELANTIKAN

Mantan Presiden **Megawati Soekarnoputri** tidak menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden **SBY & JK**.



@kpulomboktimur



Humas KPU Kab. Lotim

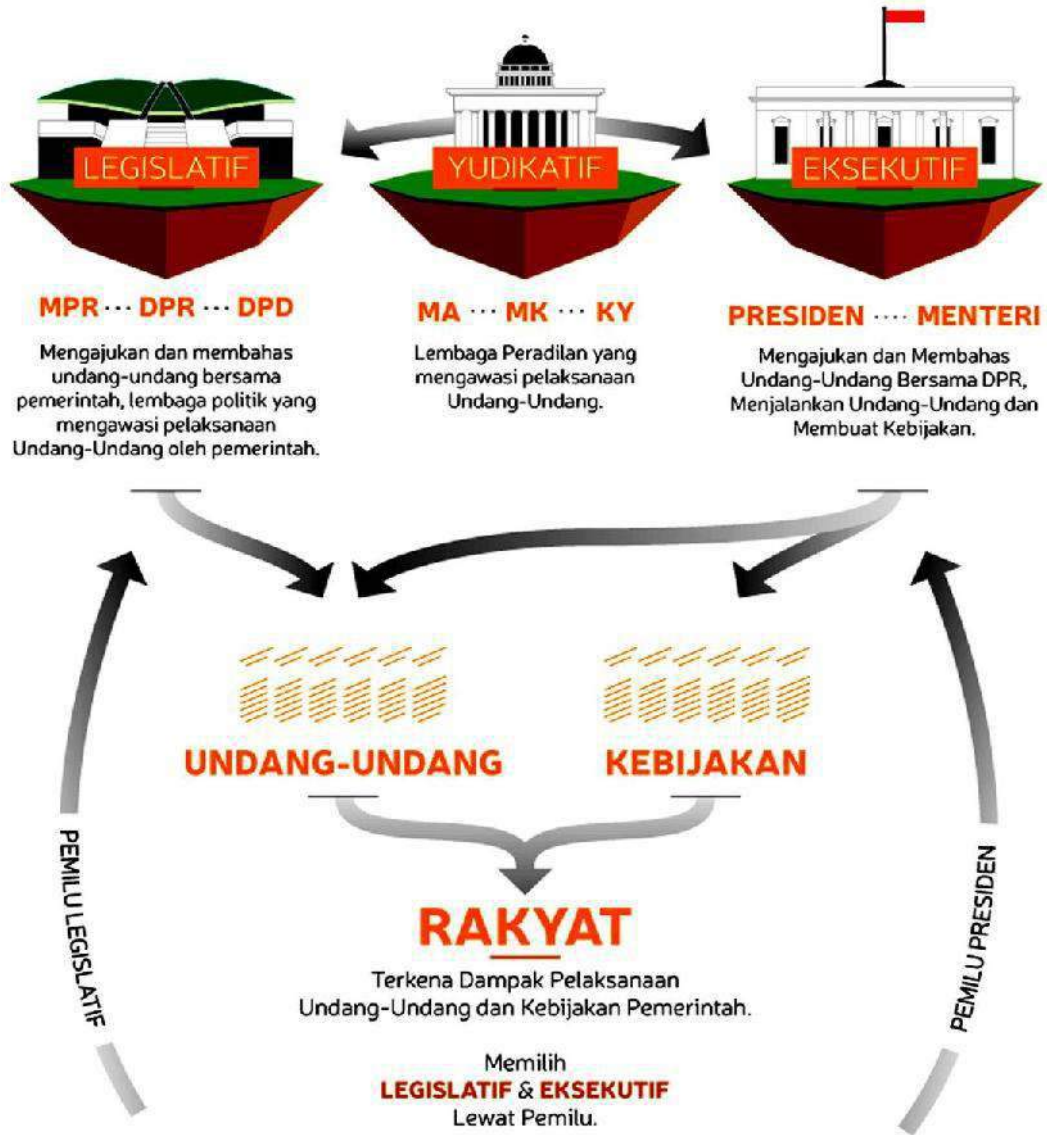


kab-lomboktimur.kpu.go.id



@HumasKpuLotim

Posisi Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Tata Negara Indonesia



**Rakyat Bukan Hanya Objek Kebijakan,
Tapi Juga Bisa Menentukan Kebijakan Lewat Pemilu**

Pemilu di Indonesia

Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Umumnya, Pemilu Presiden dan Legislatif dilakukan pada tahun yang sama, namun Pemilukada dilaksanakan secara terpisah di berbagai bagian Indonesia setiap waktu.

1 Pemilukada



Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota

2 Pemilu Legislatif

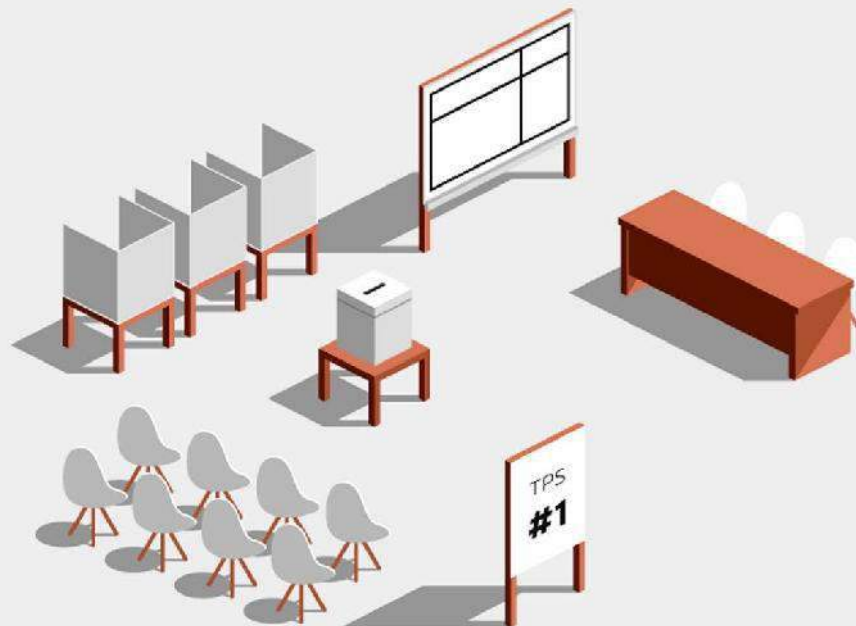


untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

3 Pemilu Presiden



untuk memilih Presiden & Wakil Presiden



5 menit untuk 5 tahun. Mari jaga suara kita !



@kpulomboktimur



Humas KPU Kab. Lotim



kab-lomboktimur.kpu.go.id



@HumasKpuLotim

LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA



INSPEKTORAT JENDERAL & INSPEKTORAT RPOV/ KAB/KOTA

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota.



KEHAKIMAN

Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan.



KEJAKSAAN

Melakukan penyidikan, penuntutan dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



MAHKAMAH AGUNG

Pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Penyelidikan atas analisis transaksi keuangan.



BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.



KOMISI YUDISIAL

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.



OMBUDSMAN RI

Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang dananya bersumber dari APBN/APBD.



KEPOLISIAN

Penyelidikan dan penyidikan atas semua tindak pidana.

PILIH "RACUN" SESUAI "TIKUSNYA"



@kpulomboktimur



Humas KPU Kab. Lotim



kab-lomboktimur.kpu.go.id



@HumasKpuLotim

PENGHITUNGAN KURSI DPR-RI



Partai politik (Parpol) peserta pemilu harus memperoleh suara minimal **3,5% sah** dari jumlah suara sah secara nasional

menentukan **BPP**

Bilangan pembagi pemilih dihitung untuk menentukan jumlah suara yang dibutuhkan dalam pembagian kursi



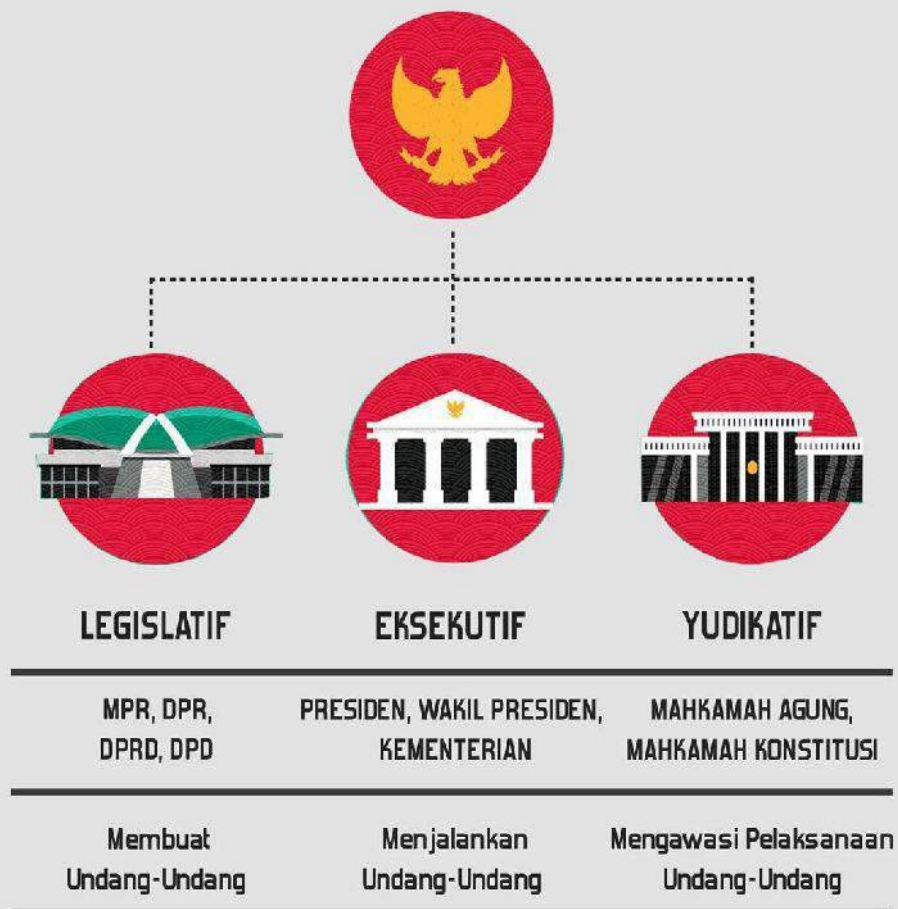
Sumber : UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu

mengenai
[**SISTEM PEMERINTAHAN**]
Indonesia

TRIAS POLITIKA adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.

Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif

Konstitusi Indonesia





PENTINGNYA PEMILU DAN DEMOKRASI

1

Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya

2

Terjaminnya pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai

3

Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

4

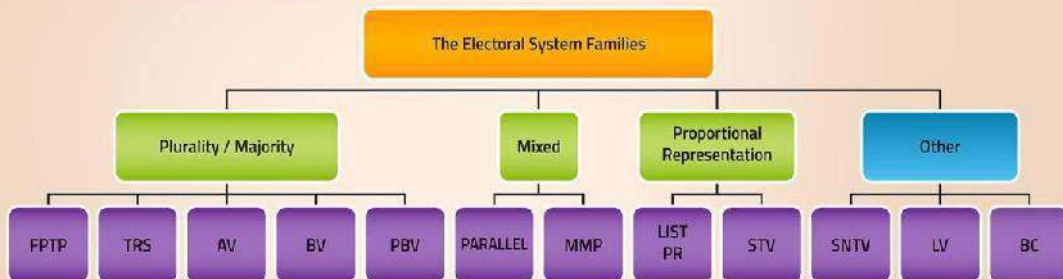
Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya Negara

SISTEM PEMILIHAN UMUM DI DUNIA



Sistem Pemilu yang digunakan oleh negara-negara di dunia sangat variatif. Sebuah negara dengan karakter demografis dan geografis yang sama belum tentu menganut sistem Pemilu yang sama. Negara yang menganut bentuk dan sistem pemerintahan yang sama belum tentu juga mengadopsi sistem Pemilu yang sama, demikian pula sebaliknya.

Rumpun Sistem Pemilu



Sumber: Andika Rejungkis, et al., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook* IDEA Sweden, 2003, hal. 28.

1. *Plurality/Majority System* (Sistem Pluralitas/Mayoritas)

Disebut juga sistem distrik. Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasar atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian *Block Vote* dan *Party Block Vote*. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya. Varian dari sistem ini adalah *First Past the Post*, *Alternative Vote*, *Two Round System* dan *Block Vote*.

2. *Proportional System* (Sistem Proporsional)

Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh Partai Politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Varian dari sistem ini adalah *Proportional Representation* dan *Transferable Vote*.

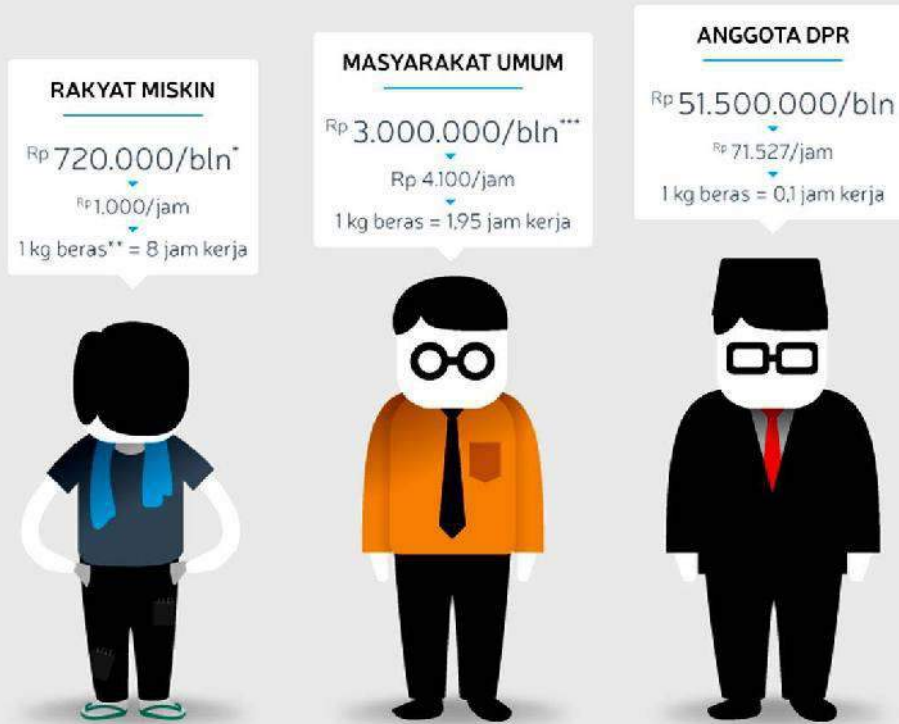
3. Sistem Campuran

Merupakan perpaduan penerapan antara *Plurality/Majority System* dan *Proportional System*. Varian dari sistem ini adalah *Parallel System* dan *Mix Member Proportional*.



Pendapatan Rakyat — VS — Pendapatan Wakil Rakyat

(Ternyata) pendapatan wakil rakyat Indonesia mencapai 17 kali lipat dari pendapatan per kapita masyarakatnya. Idealkah?



*Standar miskin World Bank = \$ 2/hari

**1 kg beras = Rp 8000

***Berdasarkan GDP per kapita Indonesia tahun 2013



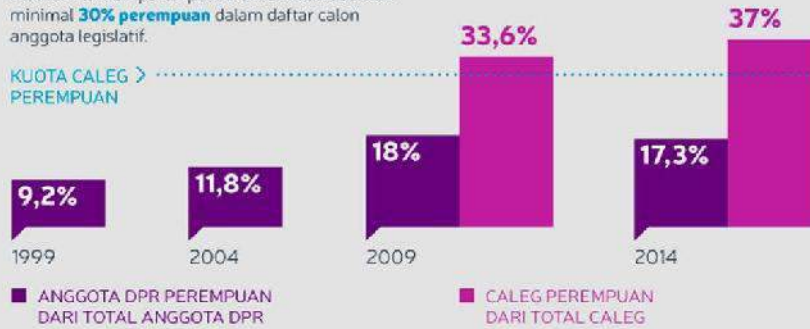
**Mereka Dibayar (sangat) Mahal!
Awasi Kinerjanya!**

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPR BARU

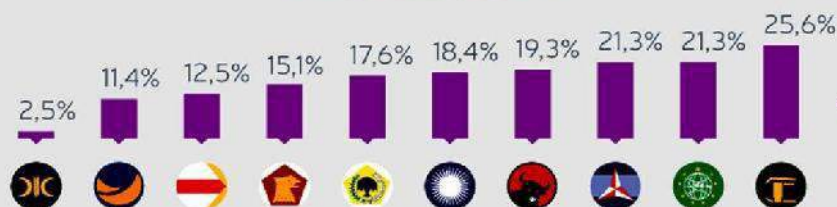
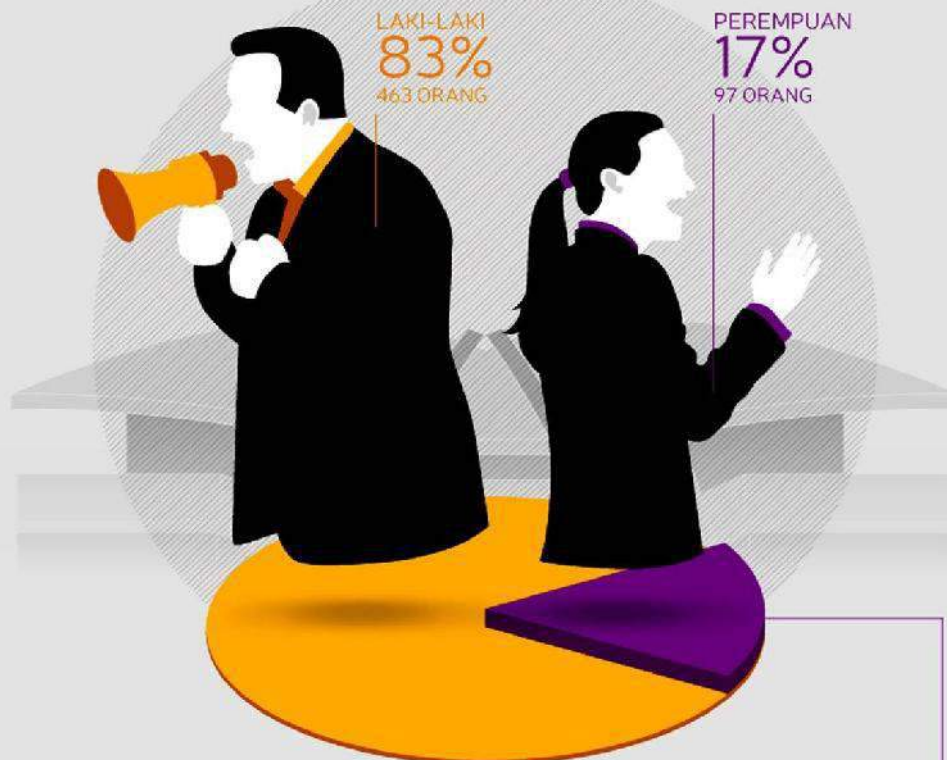
Peran dan keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik selama ini dirasa kurang. Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui penerapan kuota minimal 30% bagi perempuan di parlemen. Efektifkah hal tersebut?

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif memerintahkan partai politik untuk memasukkan minimal **30% perempuan** dalam daftar calon anggota legislatif.

KUOTA CALEG > PEREMPUAN



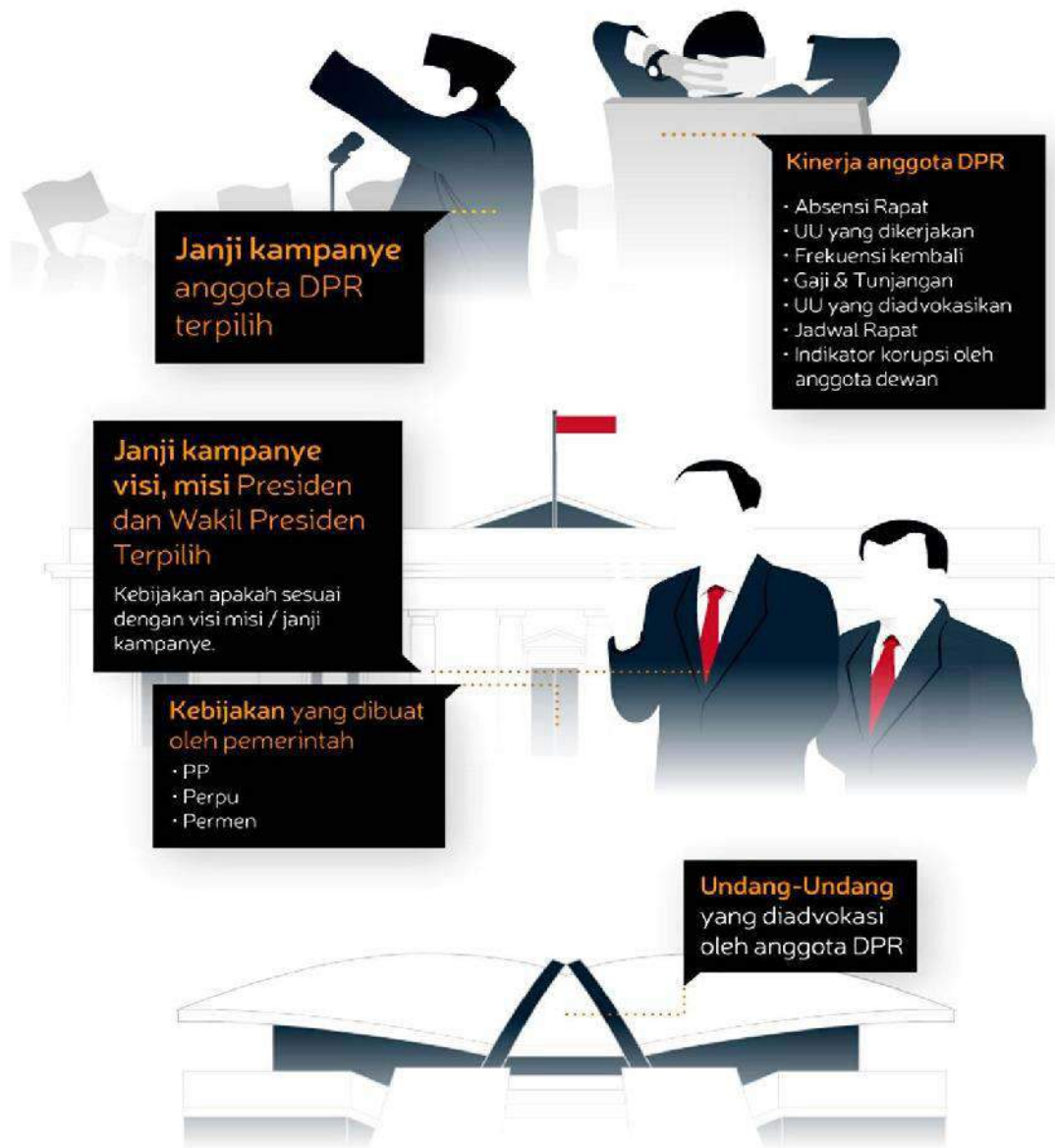
PROPORSI ANGGOTA DPR RI 2014-2019



SUDAHKAH SUARA PEREMPUAN TERWAKILI?

Setelah Pemilu

Apalagi yang Harus Kita Pantau ?



"Demokrasi tidak lahir begitu saja dengan diproklamirkan dan dituliskan dalam suatu piagam, melainkan dihidupkan sungguh-sungguh dalam asuhan dan latihan."

Mohammad Hatta, 1966